



**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA ENAM KOTA/KABUPATEN UTAMA DI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh

Sugeng Riyanto

140810101146

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA ENAM KOTA/KABUPATEN UTAMA DI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
Sugeng Riyanto
140810101146

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

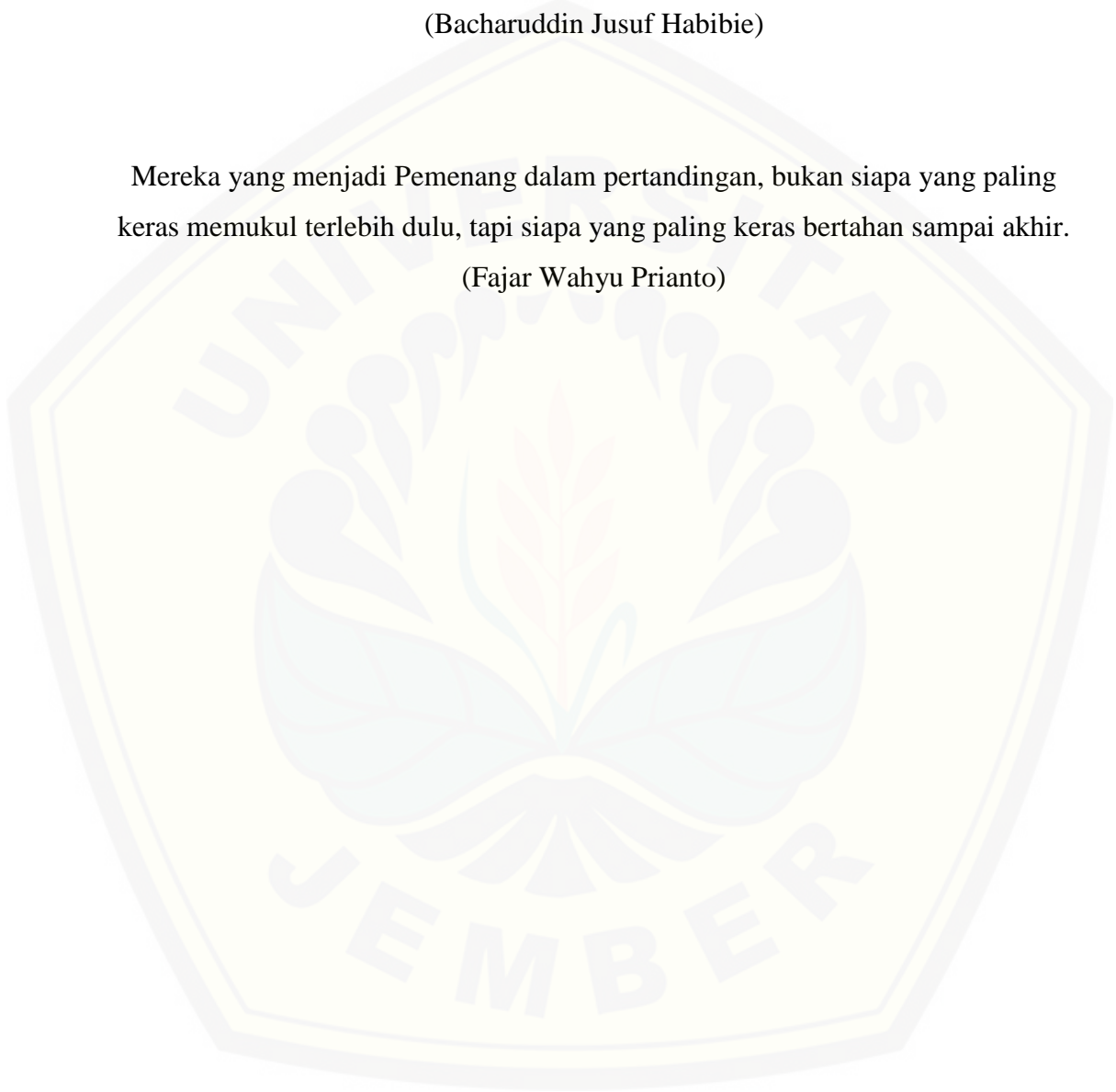
Dengan segala kerendahan hati dan ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sri Mardiyani dan ayahanda Liasur tercinta, yang senantiasa tulus dan ikhlas memberikan doa serta dukungan kepada saya hingga saat ini, mendidik dan memberikan motivasi, memberikan kasih sayang yang tak terhingga, serta menjadi inspirasi untuk meraih cita-cita;
2. Kakakku Sisca Puspita Sari dan Ragil Heru Susanto serta adekku Dewi Retno Sari yang telah memberikan dukungan, semangat, dan nasihat untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan;
3. Guru-guru yang terhormat dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang telah tulus mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan tak ternilai untuk kesuksesan saya;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha
(Bacharuddin Jusuf Habibie)

Mereka yang menjadi Pemenang dalam pertandingan, bukan siapa yang paling keras memukul terlebih dulu, tapi siapa yang paling keras bertahan sampai akhir.
(Fajar Wahyu Prianto)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugeng Riyanto

NIM : 140810101146

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Pendapatan Asli Daerah Pada Enam Kota/Kabupaten Utama di Jawa Timur” adalah benar benar-benar hasil karya sendiri, kecuali pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah dipublikasikan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar dikemudian hari.

Jember, 21 November 2018

Yang menyatakan,

Sugeng Riyanto
140810101146

SKRIPSI

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA ENAM KOTA/KABUPATEN UTAMA DI JAWA TIMUR**

Oleh

Sugeng Riyanto

NIM 140810101146

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Herman Cahyo D, S.E.,M.P.

Dosen Pembimbing II : Fajar Wahyu P, S.E., M.E.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
ENAM KOTA/KABUPATEN UTAMA DI JAWA TIMUR
Nama Mahasiswa : Sugeng Riyanto
NIM : 140810101146
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Tanggal Persetujuan : 21 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Herman Cahyo DS.E., M.P.
NIP. 197207131999031001

Fajar Wahyu P, S.E., M.E.
NIP.198103302005011003

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebatiana Viphidartin, M.Kes
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA ENAM
KOTA/KABUPATEN UTAMA DI JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sugeng Riyanto

NIM : 140810101146

Jurusan : Ilmu Ekonomi

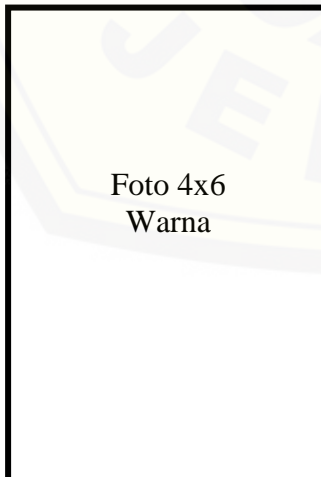
Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

07 Desember 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Riniati, M.P. (.....)
NIP. 196004301986032001
2. Sekretaris : Dr. Moehammad Fathorazzi, S.E., M.Si (.....)
NIP. 196306141990021001
3. Anggota : Dr. Moh Adenan, M.M (.....)
NIP. 196610311992031001



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak
NIP. 197107271995121001

Analisis Pendapatan Asli Daerah Pada Enam Kota/Kabupaten Utama di Jawa Timur

Sugeng Riyanto

*Jurusan Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi PAD. metode panel *Random Effect*. Faktor-faktor tersebut meliputi : PDRB, jumlah penduduk dan inflasi. Data yang diamati dalam penelitian ini adalah data runtut waktu periode 2010-2016 pada enam kota/kabupaten utama di Jawa Timur. Hasil di dapatkan ialah PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD.

Kata Kunci: PAD, PDRB, jumlah penduduk, inflasi.

Analysis of Initial Regional Income on Six Main Cities in East java

Sugeng Riyanto

*Department of Economics and Development Study, the Faculty of Economics and
Bussines, the University of Jember*

ABSTRACT

PAD as one of the regional revenues reflects the level of regional independence. The greater the PAD it shows that the region is able to implement fiscal decentralization and the dependence on the central government is reduced. PAD is defined as revenue from sources within its own territory, which are collected under the applicable law. The aim of this research is to analyze the factors that influence PAD. Random Effect panel method. These factors include: GDP, population and inflation. The data observed in this study are sequential data for the period 2010-2016. The results obtained are that GDP has a positive and significant effect on PAD. The total population has a negative and significant effect on PAD. Inflation has a positive and not significant effect on PAD.

Keywords: *PAD, GDP, population, inflation.*

RINGKASAN

Analisis Pendapatan Asli Daerah Pada Enam Kota/Kabupaten Utama di Jawa Timur, Sugeng Riyanto, 140810101146, 2018, 89 halaman, Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan membuat daerah untuk lebih mandiri.

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Kewenangan otonomi secara luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat yang adil, merata, demokratis serta berkelanjutan (Halim, 2014:35). Otonomi daerah diberlakukan sejak dikeluarkannya UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya dan merupakan salah satu faktor pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu memperhatikan beberapa faktor antara lain yaitu Profuk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan inflasi. Terdapat beberapa kabupaten/kota di provinsi Jawa

Timur dimana dalam Penerimaan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh inflasi yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kabupaten Jember dan Kabupaten Sumenep. Faktor faktor lain yang mempengaruhi PAD selain inflasi adalah PDRB dan jumlah penduduk.

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio PDRB mengalami peningkatan maka akan meningkatkan PAD Enam Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2010–2016, variabel Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio Jumlah Penduduk mengalami kenaikan maka akan menurunkan PAD Enam Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2010–2016 dan Variabel Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio Inflasi mengalami kenaikan maka akan meningkatkan PAD Enam Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2010-2016.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Pada Enam Kota/Kabupaten Utama di Jawa Timur”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sjarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik nasehat, motivasi, dorongan, dan kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Herman Cahyo D, S.E., M.P. selaku dosen pembimbing utama yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan serta saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Fajar Wahyu P, S.E., M.E. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak waktu luang, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, memberikan saran serta kritikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Dr. Sebastiana Viphidartini, M.Kes selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terimakasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Dr. Sebastiana Viphindarati, M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
6. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;

7. Ibunda Sri Mardiyani dan ayahanda Liasur yang tercinta, yang senantiasa tulus memberikan doa, dukungan, semangat, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tiada ternilai;
8. Kakak tercinta Sisca Puspita Sari dan Ragil Heru Susanto serta Adek tercinta Dewi Retno Sari yang telah memberikan semangat, motivasi serta dukungan;
9. Guru-guru mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas yang telah dengan sabar mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta tidak ternilai;
10. Sahabat tercinta Zainur Rosi dan Andriyanto Bagus yang telah memberikan dukungan dan semangat baik dalam suka maupun duka selama masa kuliah;
11. Teman dekat saya Devi Oktavia H.A telah menjadi *partner*, sahabat, saudara yang selalu memberikan semangat dan motivasinya;
12. Teman-teman KKN 36 SDGs, terkhusus kepada Zahra, Jozahra, Selvina, dan Delsa, Ary, Handika, Mbak Retno dan Balqis terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca serta penulis selanjutnya.

Jember, 21 November 2018

Sugeng Riyanto
NIM. 140810101146

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pajak.....	8
2.1.2 Desentralisasi Daerah.....	9
2.1.3 Teori Ekonomi Keuangan Daerah.....	10
2.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintahan	11
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah	14
2.1.6 Sumber-sumber PAD	15

2.2 Hubungan antar Variabel	16
2.2.1 PDRB terhadap PAD	16
2.2.2 Jumlah Penduduk terhadap PAD	18
2.2.3 Pengaruh Inflasi terhadap PAD	19
2.3 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Konseptual	26
2.4 Hipotesis Penelitian	27
BAB 3. METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Unit Analisis	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Metode Analisis	28
3.4.1 Metode Analisis Data Panel	28
3.4.2 Uji Chow	31
3.4.3 Uji Hausman	31
3.4.4 Uji LM	32
3.4.5 Estimasi Model	32
3.5 Uji Statistika	33
3.5.1 Uji F (Uji Secara Serentak)	33
3.5.2 Uji t (Uji Secara Parsial)	34
3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)	35
3.6 Uji Asumsi Klasik	36
3.6.1 Uji Multikolinieritas	36
3.6.2 Uji Heterokedastisitas	36
3.6.3 Uji Autokorelasi	37
3.6.4 Uji Normalitas	37
3.7 Definisi Variabel Operasional	38
BAB 4. PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum	39
4.1.1 Keadaan Geografis Provinsi Jawa Timur	39
4.1.2 Keadaan Penduduk di Enam Kota/Kabupaten Utama	

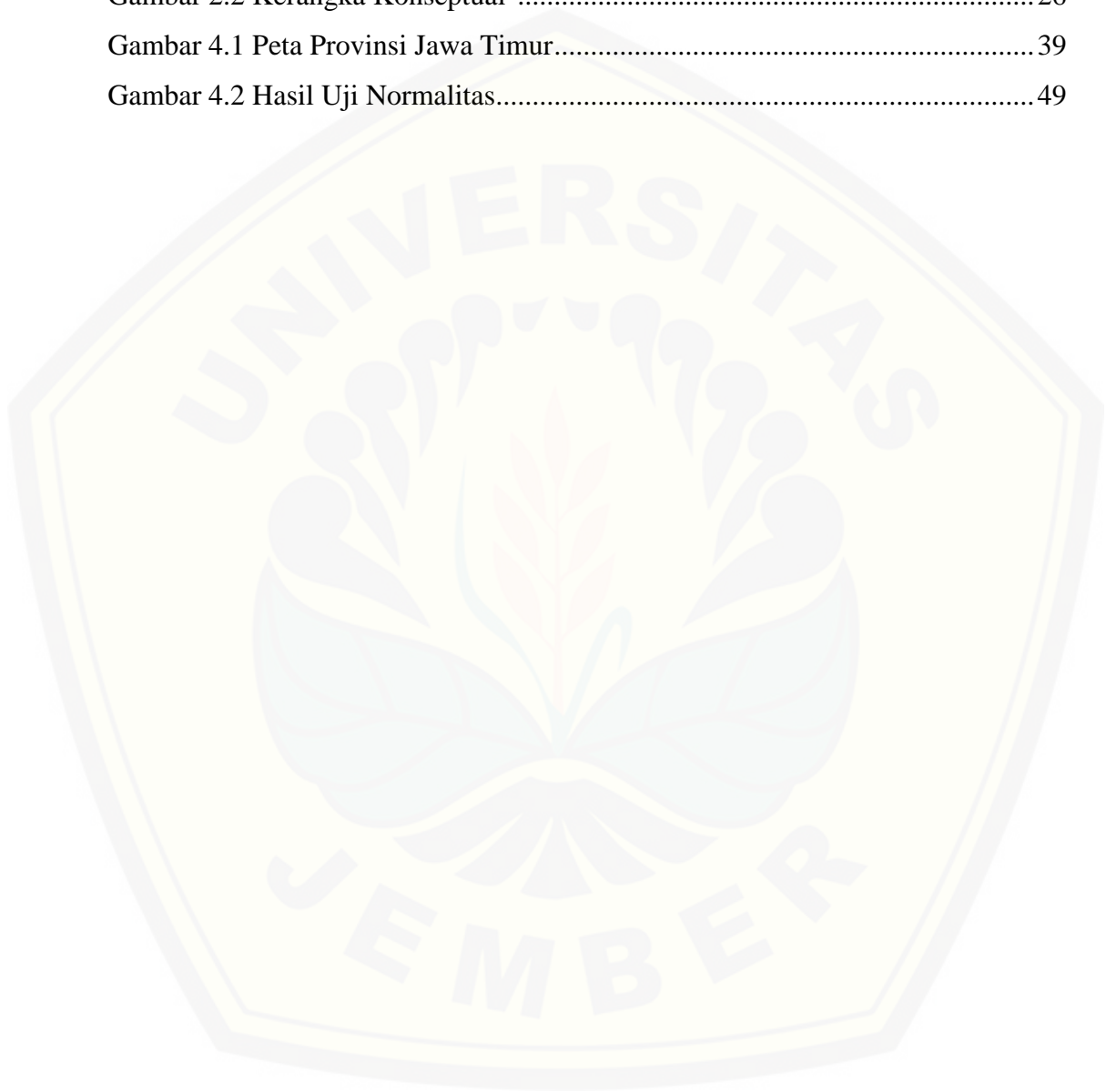
di Jawa Timur	41
4.1.3 Keadaan Ekonomi di Enam Kota/Kabupaten Utama di Jawa Timur	42
4.2 Hasil Analisis	42
4.2.1 Uji Hausman.....	42
4.2.2 Analisis Regresi Data Panel	43
4.3.3 Uji Statistik.....	44
4.3.4 Uji Asumsi Klasik	47
4.3 Pembahasan	50
4.3.1 Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah	50
4.3.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah..	51
4.3.4 Pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah	52
BAB 5. PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing Kota/Kabupaten Utama di Provinsi Jawa Timur (juta rupiah)	4
Tabel 1.2 Perkembangan PDRB Kota/Kabupaten Utama di Provinsi Jawa Timur (miliar rupiah)	4
Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota/Kabupaten Utama di Provinsi Jawa Timur (juta jiwa)	5
Tabel 1.4 Laju Inflasi di Kota/Kabupaten Utama di Provinsi Jawa Timur (persen)	6
Tabel 2.1 Studi Empiris Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota/Kabupaten Utama di Provinsi Jawa Timur (juta jiwa)	41
Tabel 4.2 Perkembangan PDRB Kota/Kabupaten Utama di Provinsi Jawa Timur (miliar rupiah)	42
Tabel 4.3 Hasil Analisis Uji Hausman	43
Tabel 4.4 Hasil Analisis <i>Random Effect Model</i>	43
Tabel 4.5 Hasil Uji F	45
Tabel 4.6 Hasil Uji t	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi	47
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas	47
Tabel 4.9 Hasil Uji Heterokedastisitas	48
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas	49
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi	49

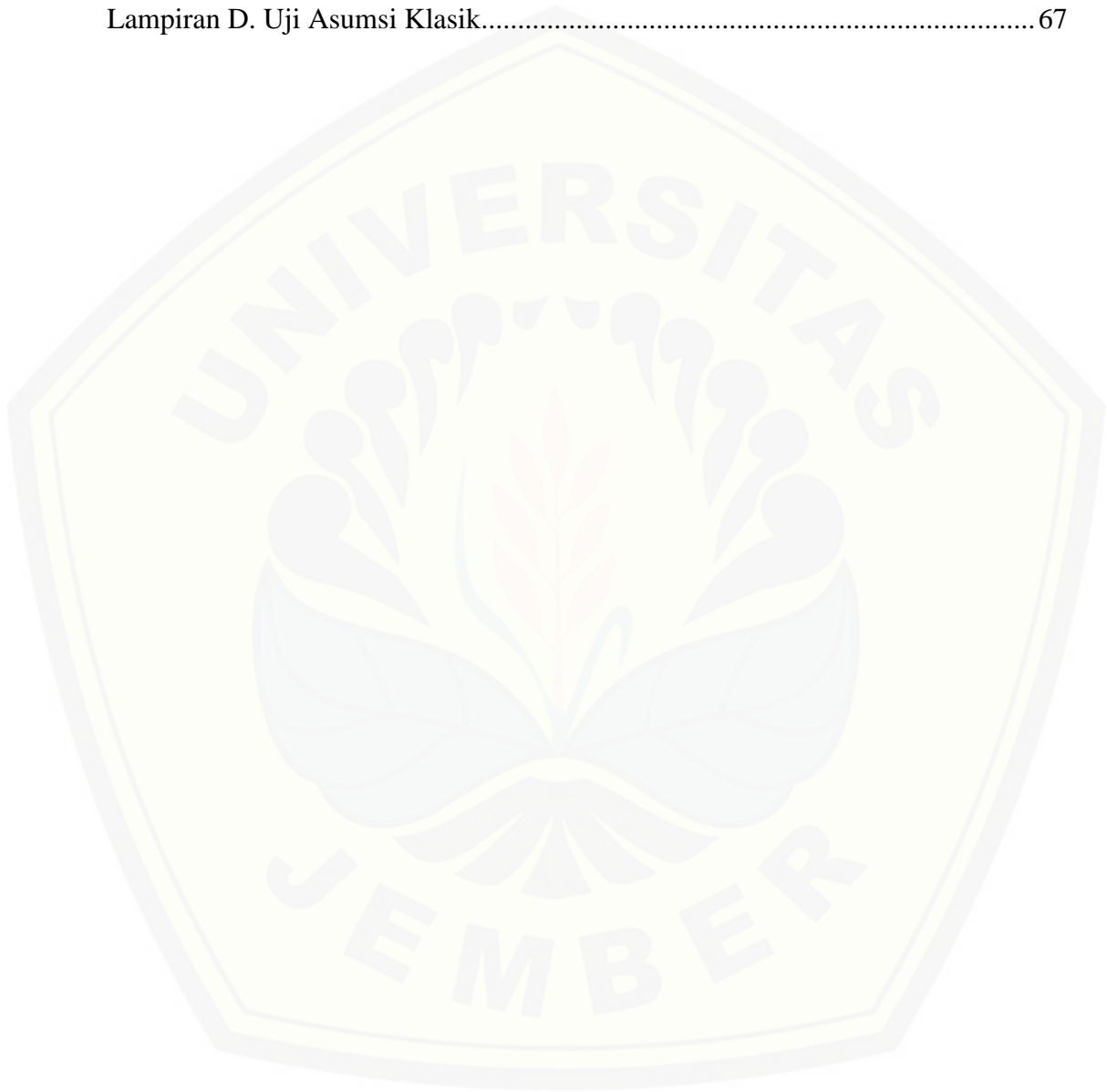
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rasio Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Nasional Berdasarkan Hukum Wagner.....	12
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	26
Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Timur.....	39
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Data Penelitian	59
Lampiran B. Uji Data Panel	63
Lampiran C. Uji Statistika	66
Lampiran D. Uji Asumsi Klasik.....	67



BAB 1. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diharapkan mampu mengelola semua masalah pemerintahan mereka sendiri termasuk perekonomian menurut asas otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan membuat daerah untuk lebih mandiri.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh setiap negara dalam mengatur sektor publik yang dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah geografi keseimbangan politik tujuan kebijakan dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara satu negara dengan negara lainnya (Bird dan Vallaincort, 1998:15). Sumber penerimaan dari pajak dan pinjaman daerah langsung masuk ke dalam APBD. Aliran dana APBD disalurkan kepada dalam bentuk transfer ke daerah yang terdiri atas dana perimbangan dana otonomi khusus dan dana penyesuaian sumber-sumber penerimaan ini digunakan daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Kewenangan otonomi secara luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat yang adil, merata, demokratis serta berkelanjutan (Halim, 2014:35). Otonomi daerah diberlakukan sejak dikeluarkannya UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, Pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan lain-lain. UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Pemda. Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagi dihasilkan. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Detailnya, diluar dari ketiga fungsi tersebut penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggung jawaban atas penggunaan dana tersebut.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara terus-menerus dimana usaha tersebut untuk menaikkan pendapatan perkapita dan kenaikan tersebut harus terus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang (Sukirno, 1985). Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan PDB di tingkat nasional atau PDRB di tingkat daerah. Ukuran utama keberhasilan dari pembangunan yang dilaksanakan yaitu pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan penyumbang PDB terbesar nomor dua di Indonesia. Keberhasilan itu antara lain disumbang oleh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Semakin besar PDRB kota dan kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur semakin besar juga PDRB provinsi Jawa Timur. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari berbagai sektor perekonomian di daerah tersebut. Pendapatan lain yang diterima suatu daerah selain PDRB adalah Pendapatan Asli Daerah.

Sumber-sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Adanya ketimpangan PAD antara satu provinsi dengan provinsi yang lain di Indonesia, maka melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terdapat sumber lainnya yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah yaitu dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH, serta lain-lain pendapatan yang sah (Handoko, 2012).

PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya dan merupakan salah satu faktor pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah. Upaya untuk meningkatkan PAD perlu memperhatikan beberapa faktor antara lain yaitu PDRB, jumlah penduduk dan inflasi. Terdapat beberapa kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dimana dalam PAD dipengaruhi oleh inflasi yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kabupaten Jember dan Kabupaten Sumenep, sehingga studi kasus dalam penelitian ini menggunakan Kota-kota dan Kabupaten-kabupaten tersebut. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan PAD Kota/Kabupaten tersebut dipengaruhi oleh inflasi. Perkembangan PAD masing-masing Kota/Kabupaten yang menjadi pusat penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing Kota/Kabupaten Utama di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 (juta rupiah)

Tahun	Kota/Kabupaten					
	Surabaya	Malang	Jember	Kediri	Madiun	Sumenep
2010	1 036 167.5	101 519.5	146 452.6	77 666.6	28 146.3	37 940.0
2011	2 139 625.6	158 446.8	180 265.8	88 275.2	38 037.5	47 385.2
2012	2 353 324.9	175 985.1	211 617.9	101 473.8	46 554.0	69 786.8
2013	2 570 793.9	262 741.1	290 135.2	126 965.3	55 683.8	91 136.8
2014	2 953 980.9	336 245.8	460 926.6	137 460.8	85 739.8	115 497.6
2015	3 520 137.3	353 427.7	508 051.0	128 676.4	111 379.4	166 654.3
2016	3 839 158.4	379 846.8	485 081.9	191 731.5	132 435.4	169 032.5

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Negara, 2010-2016 diolah

Semakin tinggi pendapatan perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Sehingga kemampuan masyarakat membayar pajak yang meningkat. Adapun data perkembangan PDRB di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.2 Perkembangan PDRB Kota/Kabupaten Utama di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 Berdasarkan Harga Konstan 2010 (miliar rupiah)

Tahun	Kota/Kabupaten					
	Surabaya	Malang	Jember	Kediri	Madiun	Sumenep
2010	231 204.7	31 377.3	33 375.5	57 550.6	6 081.2	15 136.5
2011	247 686.6	33 273.7	35 208.2	60 020.1	6 494.4	16 064.8
2012	265 892.1	35 355.7	37 262.0	63 185.1	6 937.7	17 665.0
2013	286 050.7	37 547.7	39 519.2	65 408.8	7 470.7	20 218.1
2014	305 947.6	39 724.7	41 971.7	69 232.9	7 965.3	21 476.9
2015	324 215.2	41 952.1	44 222.6	72 945.5	8 455.4	21 750.6
2016	343 652.6	44 303.9	46 533.6	76 988.4	8 954.7	22 311.7

Sumber : Badan Pusat Statistika Jawa Timur, 2010-2016 diolah

Dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi daerah untuk meningkatkan PAD. Suatu daerah dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan perekonomiannya berkembang dengan baik maka PDRB perkapita akan meningkat yang memperkuat PAD suatu daerah.

Faktor lain adalah jumlah penduduk dimana kaitanya dengan peningkatan PAD adalah semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai punggutan yang ditetapkan pemerintah, sehingga semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin besar juga nilai PAD dan apabila jumlah penduduk yang tinggi diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan penggunaan skala ekonomi dalam produksi. Perkembangan jumlah penduduk dapat dilihat melalui Tabel 1.2.

Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota/Kabupaten Utama di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 (juta jiwa)

Tahun	Kota/Kabupaten					
	Surabaya	Malang	Jember	Kediri	Madiun	Sumenep
2010	2 771 615	822 201	2 329 929	269 193	171 305	1 044 588
2011	2 788 932	828 491	2 353 025	271 511	172 073	1 050 678
2012	2 805 718	834 527	2 367 482	273 695	172 886	1 056 415
2013	2 821 929	840 803	2 381 400	276 619	174 114	1 061 211
2014	2 833 924	845 973	2 394 608	278 072	174 373	1 067 202
2015	2 848 583	851 298	2 407 115	280 004	174 995	1 072 113
2016	2 862 406	856 410	2 424 982	281 978	175 607	1 076 805

Sumber : Badan Pusat Statistika Jawa Timur, 2010-2016 diolah

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi menimbulkan beberapa efek buruk pada perekonomian salah satunya mengurangi pendapatan riil (Sukirno, 2004). Tetapi dengan adanya inflasi maka upah atau gaji juga naik, karena upah riil tergantung pada produktivitas marjinal tenaga kerja. Kesejahteraan ekonomi tergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga. Berikut pada Tabel 1.3 adalah laju inflasi yang ada di Kota/Kabupaten yang menjadi tempat penelitian.

Tabel 1.4 Laju Inflasi di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur (persen)

Tahun	Kota/Kabupaten					
	Surabaya	Malang	Jember	Kediri	Madiun	Sumenep
2010	5.4	4.9	5.0	5.2	4.9	5.1
2011	6.2	5.1	4.9	4.6	5.0	4.9
2012	4.4	4.4	3.9	4.8	3.7	5.4
2013	6.6	7.4	6.7	7.1	6.5	6.6
2014	6.3	6.7	5.9	6.2	6.0	5.9
2015	6.0	6.0	5.0	4.5	5.1	5.2
2016	3.2	3.1	2.5	1.8	2.8	2.8

Sumber : Kajian Ekonomi Regional, 2010-2016 diolah

Penelitian yang dilakukan oleh Rarung (2016) menyatakan pengelolaan PAD yang optimal mampu memberikan kontribusi yang besar bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam perkiraan potensi PAD diperlukan informasi dan tolok ukur yang nyata terjadi di lapangan serta dikehendaki oleh masyarakat daerah agar terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD, karena PAD dapat digunakan sesuai dengan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah non PAD sifatnya lebih terikat dan tidak diperuntukan untuk keperluan daerah seutuhnya. Peningkatan PAD akan meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan urusan daerah (Handoko, 2012).

Berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memperjelas pengaruh PDRB, jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh terhadap PAD. Sehubungan dengan masalah diatas maka muncul pernyataan pengaruh PDRB, jumlah penduduk dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di enam Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Timur.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD di enam Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD di enam Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap PAD di enam Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yakni :

1. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap PAD di enam Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD di enam Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
3. Mengetahui pengaruh Inflasi terhadap PAD di enam Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai:

1. Bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pertumbuhan penduduk serta masalah faktor PAD.
2. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi PAD .
3. Bahan informasi pihak lain yang memerlukan sehubungan dengan penelitian sejenis yang akan dilakukan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Dalam Mardiasmo (2009: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara Adriani menyatakan Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang ditunjuk secara langsung. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

A. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi perpajakan:

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan

melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak (Waluyo, 2005).

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial pemerintah (Mardiasmo, 2009:1).

2.1.2 Desentralisasi Daerah

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculkan otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, Desentralisasi akhir –akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintah karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintah di Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah –daerah yang tertinggal dalam suatu negara agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional, Menurut Josef Riwo Kaho, tujuan desentralisasi adalah, (a) mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan, (b) dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yancepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari Pemerintah Pusat, (c) dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan, (d) dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus daerah, (e) mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat, (f) dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administrasi (dekonsentrasi). Devolusi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada sub nasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Konsekuensi dari devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintah di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu kepada unit-unit untuk dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan dekonsentrasi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintah pusat kepada unit-unit di daerah. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Menurut Haris, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

2.1.3 Teori Ekonomi Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan suatu daerah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “selfsupporting” dalam bidang keuangan. Halim (2007) mengungkapkan bahwa

kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Menurut Halim (2007), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari “keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).” “Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD.”

Pengertian laporan keuangan sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Dalam teori ekonomi makro, ada dua pandangan yang berbeda berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional (Hidayat : 2010). Kedua pandangan yang berbeda mengenai pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) dalam kajian teori ekonomi makro dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Wagner dan Pengikutnya

Dari persamaan empiris yang dilakukan oleh Adolph Wagner terhadap Negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke 19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat (*law of ever increasing state activity*). Wagner mengukur pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional dan hukum wagner dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{matrix} GpCt > GPCt-1 > GPCt-2 > GPCt-n \\ YpCt & YpCt-1 & YpCt-2 & YpCt-n \end{matrix}$$

dimana :

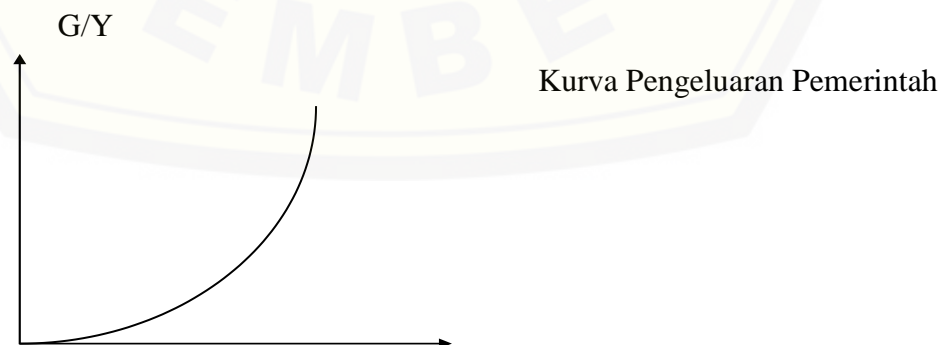
GpC : Pengeluaran pemerintah Per kapita

YpC : Pendapatan nasional Per kapita

t : Indeks Waktu

Disamping itu menurut wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu : (1) Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, (2) Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, (3) Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, (4) Perkembangan demokrasi dan (5) ketidak efisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Suparmoko : 2000).

Secara grafik, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional (GpC/Yp atau G/Y) ditunjukkan oleh sebuah kurva yang eksponensial sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Rasio Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Nasional Berdasarkan Hukum Wagner

Sumber : Suparmoko: 2000

Menurut Wagner pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri, industri masyarakat dan sebagainya akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan pasar eksternalitas negatif menjadi semakin besar. Sejalan dengan itu sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 6 di atas, secara relatif peranan pemerintah akan semakin meningkat (Mangkoesebroto :1994).

Terdapat kelemahan dari hukum Wagner tersebut yakni tidak didasarkan pada teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Hal ini disebabkan karena Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori organis mengenai pemerintah (Organic Theory Of The State). Yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat yang lain.

2. Teori Keynes

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + X - M$ merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Disamping itu pemerintah perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melamahkan kegiatan pihak swasta.

Banyak para ahli ekonomi publik telah lama menaruh perhatiannya pada penyelidikan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi semenjak mereka menyadari bahwa pengeluaran pemerintah memegang peranan yang sangat penting menurut Sukrino dalam Suparmoko (2000) pengeluaran pemerintah dapat dipandang sebagai perbelanjaan otonomi karna pendapatan nasional bukanlah merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanja. Pada dasarnya ada tiga faktor penting yang akan menentukan pengeluaran pemerintah pada suatu tahun tertentu, yaitu (1) pajak yang diharapkan akan diterima (2) pertimbangan-perimbangan politik, dan (3) persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi.

Sedangkan Wijaya dalam Suparmoko (2000) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah maupun efek penggandaan (multiplier effect) dan merangsang kenaikan pendapatan nasional yang lebih besar daripada pembayaran dalam jumlah yang sama pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan serta produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (full employment).

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, PAD adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan.

PAD dapat diperoleh melalui sumber-sumber dana yang didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat. PAD adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber PAD. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah

dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004).

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya PAD sendiri.

2.5.1 Sumber-Sumber PAD

Adapun sumber-sumber PAD menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu:

1. PAD yang terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternative untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budget tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu

- retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan
2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.2 Hubungan antar Variabel

2.2.1 Pengaruh PDRB terhadap PAD

PDRB Konstan akan memberikan dampak langsung pada perolehan pendapatan pemerintah, karena salah satunya peningkatan tarif pajak yang telah

ditentukan oleh pemerintah daerah untuk kalangan pengusaha, seperti halnya teori Peacock dan Wisemen (dalam Mangkosoebroto, 2010; 173) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan berbagai pemungutan pajak dan meningkatkannya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Nilai PDRB atau pendapatan perkapita diperoleh dari berbagai pendapatan nasional bruto atau pendapatan domestik bruto pada suatu tahun tertentu dengan jumlah produk pada tahun tersebut. Dengan demikian, pendapatan perkapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu persamaan sebagai berikut (Sadono Sukirno, 2004):

$$\begin{aligned} \text{a. Perkapita PNB} &= \frac{\text{Pendapatan Nasional Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}} \\ \text{b. Perkapita PDB} &= \frac{\text{Pendapatan Domestik Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}} \end{aligned}$$

Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk mengkonsumsi barang dan jasa. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro, 2006).

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

2.2.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD

Jumlah penduduk dimana kaitanya dengan peningkatan PAD adalah semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, sehingga semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin besar juga nilai PAD dan apabila jumlah penduduk yang tinggi diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan penggunaan skala ekonomi dalam produksi.

Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula (Sucipto Wirosardjono:1998).

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Agus Widarjono, 1999 dalam Ari Budihardjo, 2003)

Adam Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

2.2.3 Pengaruh Inflasi terhadap PAD

Teori kuantitas uang David Hume dalam Mankiw (2006) menyatakan bahwa bank sentral, mengawasi jumlah uang beredar, memiliki kendali tinggi atas tingkat inflasi, jika bank sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil, tingkat harga akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat tingkat harga akan meningkat dengan cepat.

Menurut Boediono (1985), Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Inflasi dapat terjadi karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi ini disebut demand inflation. Inflasi juga dapat terjadi karena biaya Produksi naik, ini disebut *Cost Inflation*.

Mankiw (2006:87-88) inflasi akan mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah serta pengeluaran pemerintah daerah, Mankiw mengutarakan bahwa seluruh Pemerintah pusat ataupun daerah mengeluarkan uang. sebagian dari pengeluaran ini yaitu untuk membeli barang dan jasa (untuk pekerja pemerintah, kepentingan publik), dan sebagian untuk menyediakan pembayaran transfer (untuk orang miskin dan kaum lansia). Pemerintah bisa mendanai pengeluarannya dalam tiga cara. Pertama, Pemerintah bisa meningkatkan penerimaan lewat pajak, seperti pajak penghasilan perorangan dan pajak pendapatan perusahaan. kedua, pemerintah bisa meminjam dari masyarakat dengan menjual obligasi pemerintah. Ketiga, pemerintah bisa dengan mudah mencetak uang. Dari itulah pemerintah dapat memperoleh besaran dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

(Case dan Fair, 2006) fakta bahwa ekspektasi bisa mempengaruhi tingkat harga. Ekspektasi bisa menyebabkan kita takut akan perubahan harga. Jika harga naik dan jika ekspektasi masyarakat bersifat adaptif yaitu jika mereka membentuk ekspektasi atas dasar perilaku penetapan harga sebelumnya maka perusahaan mungkin akan terus menaikkan harga meskipun permintaan melambat atau menyusut.

Jika bank sentral menurunkan inflasi dengan memperlambat tingkat pertumbuhan uang, para pekerja tidak akan melihat upah riil mereka naik dengan lebih cepat. Padahal ketika inflasi melambat perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk mereka setiap tahun, dan akibatnya akan memberi para pekerja kenaikan upah yang lebih kecil (Mankiw, 2006).

Nopirin (1987) pihak-pihak yang mendapat keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan yang persentasenya lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan persentase yang lebih besar dari pada laju inflasi. adanya serikat buruh yang kuat kadang kala berhasil dalam menuntut kenaikan upah dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi. dengan demikian inflasi dapat menyebabkan pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat. Simanjuntak dalam Halim (2001) mengemukakan bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran.

Jumlah uang beredar menentukan tingkat inflasi, semakin banyak uang yang beredar maka inflasi semakin tinggi. Inflasi dianggap sebagai masalah dalam perekonomian karena menurunnya daya beli masyarakat. Tetapi sebenarnya tidak ada yang berubah, dengan adanya inflasi maka upah atau gaji juga naik, karena upah riil tergantung pada produktivitas marjinal tenaga kerja. Kesejahteraan ekonomi tergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga. Ketika inflasi melambat perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk setiap tahun, yang mengakibatkan pendapatan pengusaha lebih besar dan akan memberi para pekerja kenaikan upah yang lebih kecil. Dalam hal ini pemerintah mengenakan pajak untuk memberikan potensi penerimaan daerah lebih banyak.

2.3 Penelitian Terdahulu

Agoes (2011) meneliti tentang *Analisis Kontribusi Penerimaan Kontribusi Pasar terhadap PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan*. Hasil penelitian membuktikan bahwa suatu keluaran atau suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang direncanakan oleh suatu

organisasi atau perusahaan dapat dicapai, dengan kata lain output yang direncanakan dengan output yang sebenarnya dicapai harus sama. Apabila output yang direncanakan lebih besar daripada output sebenarnya, maka dapat dikatakan kegiatan itu kurang efektif. Sebaliknya jika output yang direncanakan lebih kecil daripada output yang sebenarnya maka dapat dikatakan kegiatan itu lebih efektif. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap daerah dari tahun 2002–2006 mengalami penurunan yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan daerah yang tidak diimbangi oleh peningkatan penerimaan retribusi pasar.

Adam (2013) meneliti tentang *Hubungan Retribusi Daerah dan Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel*. Hasil penelitian membuktikan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel karena banyak wisatawan yang datang tetapi tidak menginap di Hotel melainkan di rumah kerabat ataupun keluarganya, sedangkan jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan PajakHotel.

Santosa (2005) meneliti tentang *Analisis PAD dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*. Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi presentasi perubahan PAD adalah Total pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB sangat kuat.

Antari (2013) meneliti tentang *Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Gianyar*. Hasil penelitian membuktikan bahwa jumlah kunjungan wisatawan domestik dan retribusi objek wisata berpengaruh terhadap PAD kabupaten Gianyar.

Taras (2017) meneliti tentang *Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali*. Hasil penelitian membuktikan bahwa Kontribusi pajak daerah dalam peningkatan PAD tergolong sangat baik. Pemerintah Kabupaten Badung sudah mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan mengelola penerimaan pajak daerahnya dengan baik.

Mailangkay (2015) meneliti tentang *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara*. Hasil penelitian membuktikan bahwa Potensi

pemungutan PAD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara begitu besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Tingkat efektifitas pemungutan seluruh sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah sudah sangat efektif karena dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Jarina (2013) meneliti tentang *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Tahun 2008-2012*. Hasil penelitian membuktikan bahwa potensi pemungutan PAD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi pajak daerah di Kota Manado begitu besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) selama lima tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Rani (2015) meneliti tentang *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan Periode 2005-2014)*. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan, Sedangkan variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-karesidenan Pekalongan.

Usman (2013) meneliti tentang *Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur*. Hasil penelitian membuktikan bahwa Kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah, setelah di lakukan pengujian disimpulkan secara umum tingkat kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lainlain PAD yang sah tidak mencapai tingkat kategori yang sangat baik.

Apriliasari (2016) meneliti tentang *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi (Periode 2010-2013)*. Hasil penelitian membuktikan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah dibandingkan faktor-faktor lainnya.

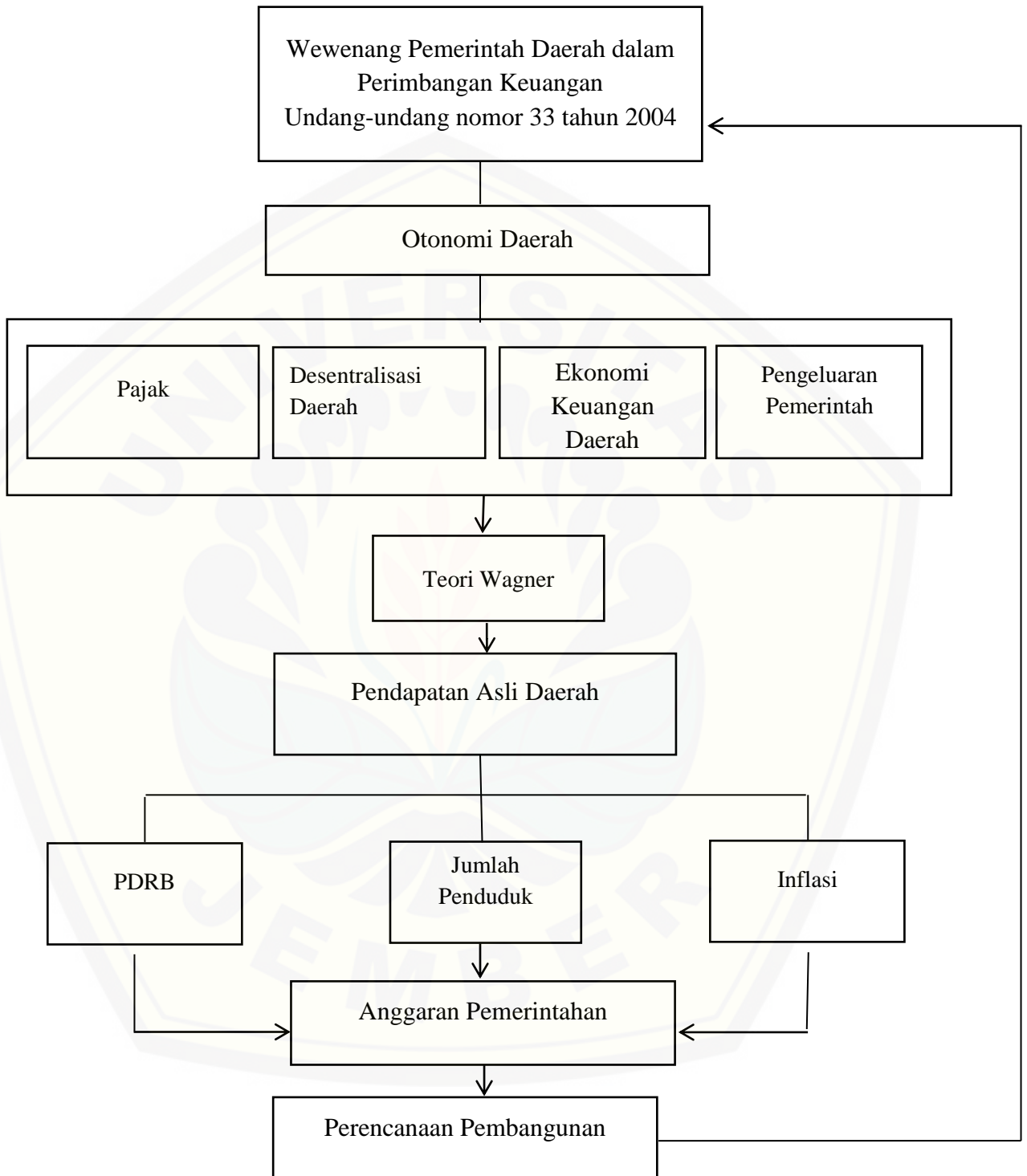
Tabel 2.1 Studi Empiris Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Agus (2011)	Analisis kontribusi penerimaan kontribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten Pamekasan	Penerimaan Kontribusi Pasar, PAD	Kontribusi Retribusi Pasar terhadap daerah dari tahun 2002–2006 mengalami penurunan yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan daerah tidak diimbangi oleh peningkatan penerimaan retribusi pasar.
2	Adam (2013)	Hubungan Retribusi Daerah dan Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel.	Retribusi Daerah, Jumlah Hotel, dan Penerimaan Pajak Hotel	Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel karena banyak wisatawan yang datang tetapi tidak menginap di Hotel melainkan di rumah kerabat ataupun keluarganya, sedangkan jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel.
3	Santosa (2015)	Analisis PAD dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri.	Total Pengeluaran Pemerintah, Jumlah penduduk, PDRB dan PAD	Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Presentasi perubahan PAD adalah Total pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB sangat kuat.
4	Antari (2013)	Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar.	PAD , Jumlah kunjungan wisatawan domestik, Retribusi Daerah mancanegara, dan retribusi objek wisata.	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan retribusi objek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asl daerah kabupaten Gianyar.

5	Taras (2017)	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali	Pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah	Kontribusi pajak daerah dalam peningkatan PAD tergolong sangat baik. Pemerintah Kabupaten Badung sudah mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan mengelola penerimaan pajak daerahnya dengan baik
6	Mailangkay(2015)	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara	PAD, pajak daerah dan retribusi daerah	Potensi pemungutan PAD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara begitu besar terhadap PAD. Tingkat efektifitas pemungutan seluruh sumber-sumber penerimaan PAD sudah sangat efektif, karena dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan
7	Jarina (2013)	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Tahun 2008-2012	PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pemungutan PAD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi pajak daerah di Kota Manado begitu besar terhadap PAD selama tahun 2008 sampai tahun 2012

8	Rani (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota EksKaresidenan Pekalongan Periode 2005-2014)	PAD, Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Jumlah Penduduk	Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan, Sedangkan variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-karesidenan Pekalongan
9	Usman (2013)	Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur	PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah, setelah di lakukan pengujian disimpulkan secara umum tingkat kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lainlain PAD yang sah tidak mencapai tingkat kategori yang sangat baik
10	Apriliasari (2016)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwasin (Periode 2010-2013)	Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah	Pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah dibandingkan faktor-faktor lainnya.

2.4 Kerangka Pemikiran

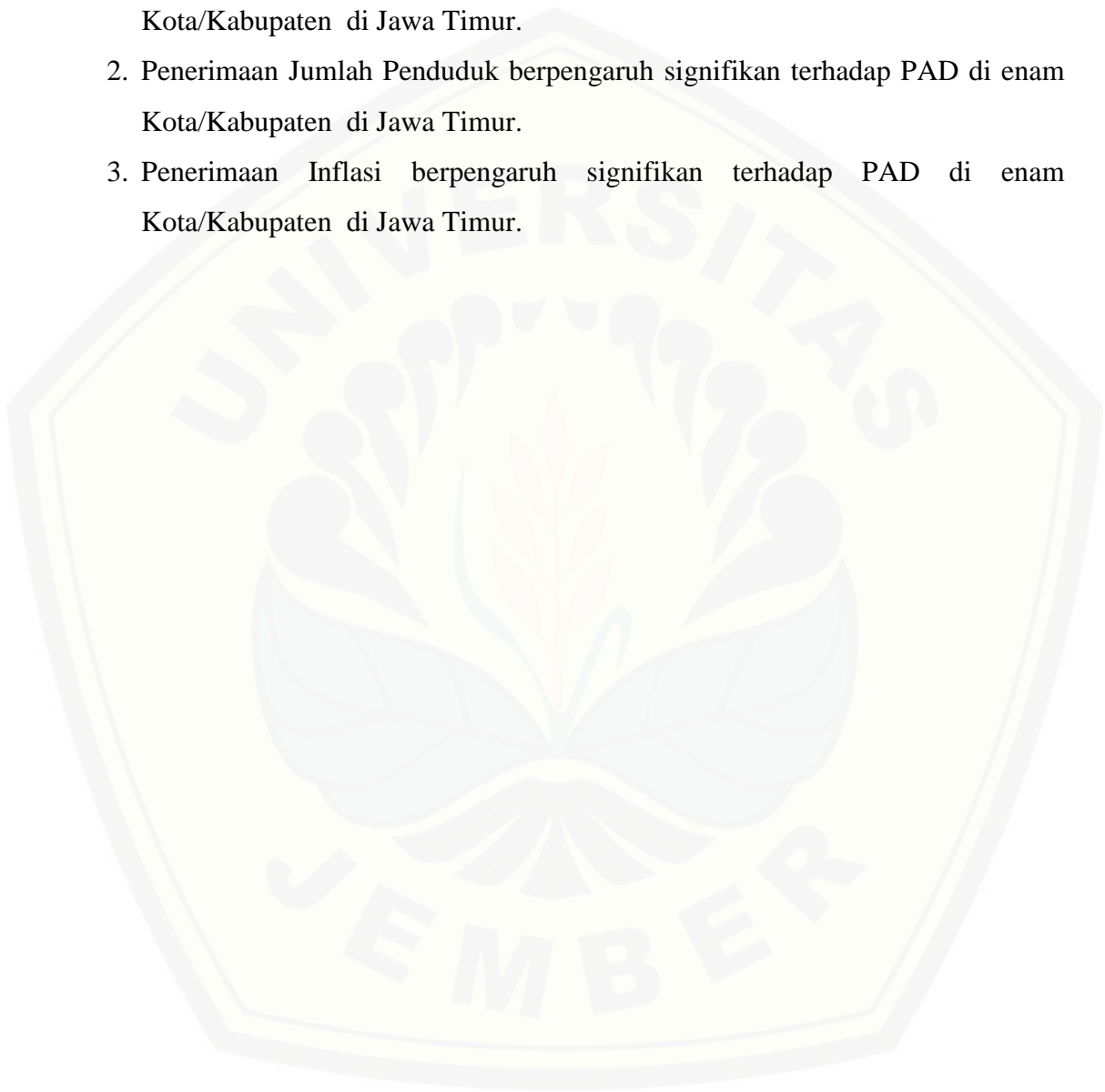


Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Penerimaan PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD di enam Kota/Kabupaten di Jawa Timur.
2. Penerimaan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD di enam Kota/Kabupaten di Jawa Timur.
3. Penerimaan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap PAD di enam Kota/Kabupaten di Jawa Timur.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hipotesa atau penelitian penjelasan atau disebut juga *explanatory research* yaitu metode penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat (Singarimbun 1995). Penelitian ini akan menjelaskan Analisis Pendapatan Asli di Enam Kota/Kabupaten di Jawa Timur.

3.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap PAD di Enam Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk angka-angka dan masih perlu dianalisis kembali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* yang meliputi kurun waktu tahun 2010-2016 pada enam Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur tentang PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Metode Analisis Data Panel

Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 9. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time series*) dan kerat lintang (*cross section*). Menurut Mahyus (2016) dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section* akan mampu menambahkan jumlah observasi secara signifikan tanpa melakukan *treatment* apapun terhadap data. Secara umum, penggunaan data panel mampu memberikan banyak keunggulan secara statistik maupun secara teori ekonomi, antara lain:

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik – individu digunakan dalam persamaan ekonometrika.
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas setiap individu, pada gilirannya membuat data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks. Misal: fenomena skala ekonomis atau perubahan teknologi yang akan diteliti dengan menggunakan panel data daripada dengan data murni *time series* atau *cross section*.
3. Jika efek spesifik adalah signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas lainnya, maka penggunaan panel data akan mengurangi masalah *omitted – variables* secara substansial.
4. Dengan meningkatnya jumlah observasi, maka akan berimplikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.

Gujarati (2003) menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam model data panel, persamaan model dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dalam analisis model panel data dikenal dua macam, yaitu:

1. Pendekatan common efek (*common effect*)

Model *common* adalah model yang paling terkendala (*restrict*) dibandingkan dengan struktur model lain sehingga persamaan *common* sebagai H_0 jika diuji dengan model lainnya. Misalkan model lain yang akan diuji adalah model dengan intercept yang berbeda. Model yang di regresi adalah model dengan slope yang sama dan intercept berbeda antar individu. Oleh karena persamaan yang diregresi sudah memiliki slope yang sama, maka restriksi hanya dilakukan pada intercept (Mahyus, 2016).

2. Pendekatan efek tetap (*fixed effect*)

Salah satu prosedur panel data adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda – beda baik lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*time series*). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka disebut dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

3. Pendekatan efek acak (*random effect*).

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel tersebut dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model panel data yang didalamnya melibatkan korelasi antar error term karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error (*error component model*) atau disebut juga dengan model efek acak (*random effect*).

Menurut Judge terdapat empat pertimbangan pokok untuk memilih antara menggunakan pendekatan efek tetap dan pendekatan efek acak dalam data panel, yaitu:

- a. Apabila jumlah data time series (T) besar sedangkan jumlah data cross section (N) kecil, maka hasil *fixed effect* dan *random effect* tidak jauh berbeda sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung yaitu *fixed effect model (FEM)*.
- b. Apabila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit cross section yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (*random*) maka *random effect* harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini

bahwa unit *cross section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan *fixed effect*.

- c. Apabila komponen error ε_i individual berkorelasi maka penaksir *random effect* akan bias dan penaksir *fixed effect* tidak bias.
- d. Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect*.

Untuk menentukan metode yang paling cocok dipilih antara CEM, FEM dan REM diperlukan uji spesifikasi model yang tepat menggambarkan data (Rosadi, 2010), yakni menggunakan beberapa pengujian yaitu uji Chow, uji Hausman dan Uji LM.

3.4.2 Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui model yang terbaik antara *common effect* dengan *fixed effect* digunakan signifikansi Chow. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Model Common Effect

H_1 : Model Fixed Effect

Kriteria pengujianya adalah sebagai berikut :

1. Jika Chow Statistif (*F- statistic*) > F tabel, maka H_0 ditolak dan lebih menggunakan FEM (*fixed effect method*)
2. Jika Chow Statistif (*F- statistic*) < F tabel, maka H_1 ditolak dan lebih menggunakan CEM (*common effect method*)

3.4.3 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui model yang terbaik antara *fixed effects* dengan *random effects* digunakan signifikansi Hausman. Uji signifikansi Hausman menggunakan uji hipotesis berbentuk $H_0 : E(C_i | X) = E(u) = 0$, atau

adanya efek acak di dalam model. Jika H_0 ditolak maka model efek akan tetap digunakan. Dalam melakukan uji Hausman diperlukan asumsi banyaknya kategori silang lebih besar daripada jumlah variable bebas termasuk konstanta yang ada pada model. Pengujian hipotesanya adalah sebagai berikut (Futurrohmin, 2011):

H_0 : Model Random Effect

H_1 : Model Fixed Effect

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Jika *Chi-Square statistic* > *Chi-Square table*, maka H_0 ditolak dan lebih menggunakan FEM (*fixed effect methode*)
2. Jika *Chi-Square statistic* < *Chi-Square table*, maka H_0 diterima dan lebih menggunakan REM (*random effect methode*).

3.4.4 Uji LM

Uji LM dilakukan untuk memilih model mana yang tepat antara *common effect* dengan *random effect* digunakan signifikansi LM. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Model Common Effect

H_1 : Model Random Effect

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Jika *Probabilitas hitung* > 0,05 maka H_0 diterima dan lebih menggunakan FEM (*common effect methode*)
2. Jika *Probabilitas hitung* < 0,05 maka H_0 ditolak dan lebih menggunakan REM (*random effect methode*).

3.4.5 Estimasi Model

Metode regresi ini digunakan untuk mengestimasi PAD di Enam Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 sampai 2016. Model

ekonometrika persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut (Gujarati, 2003):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= PAD (juta rupiah)
X ₁	= PDRB (miliar rupiah)
X ₂	= Jumlah Penduduk (juta jiwa)
X ₃	= Inflasi (persen)
β ₀	= Konstanta
β ₁	= Koefisien PDRB
β ₂	= Koefisien Jumlah Penduduk
β ₃	= Koefisien Inflasi
e	= variabel pengganggu

3.5 Uji Statistika

3.5.1 Uji F (Uji Secara Serentak)

Uji F ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat . Menurut Gujarati (2003) adalah formula uji F sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Keterangan:

F	= Pengujian secara bersama-sama
R ²	= Koefisien determinasi berganda
K	= Banyaknya variabel bebas
N	= Banyaknya sampel
k-1	= derajat bebas pembilang
n-k	= derajat bebas penyebut

Perumusan hipotesis disusun sebagai berikut:

- a. $H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$, artinya secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. $H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$, artinya secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian :

- 1) Apabila nilai probabilitas $F_{hitung} \leq \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila nilai probabilitas $F_{hitung} > \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka, H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.2 Uji t (Uji Secara Parsial)

Pengujian secara parsial adalah bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial atau untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai pengaruh paling besar atau paling signifikan terhadap variabel terikatnya. Adapun rumus yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003).

$$T_{hitung} = \frac{b_i}{Se(b_i)}$$

Keterangan :

T_{hitung} = pengujian secara parsial

b_i = koefisien regresi

$Se(b_i)$ = Standart deviasi

Perumusan hipotesis sebagai berikut:

- a. $H_0 = \beta_1 = 0$, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen;
- b. $H_0 \neq \beta_1 \neq 0$, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel pdrb, investasi, inflasi terhadap PAD di Kabupaten Jember;

Kriteria pengujian:

- 1) Apabila nilai probabilitas $t_{hitung} \leq \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil kelola yang dipisahkan dan pajak lain-lain tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Jember.
- 2) Apabila nilai probabilitas $t_{hitung} > \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka, H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya akan digunakan analisis koefisien determinasi berganda dan dengan semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin tepat model regresi yang digunakan sebagai alat uji dalam penelitian ini. Adapun rumus yang digunakan adalah (Gujarati, 2003).

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi berganda

ESS = Jumlah kuadrat yang dijelaskan

RSS = Jumlah kuadrat yang residual

TSS = Jumlah kuadrat total (ESS+RSS)

Kriteria pengujian :

- 7.4.1.1 Apabila nilai R^2 hampir mendekati 1, maka pengaruh besar variabel independen terhadap variabel dependen.
- 7.4.1.2 Apabila nilai R^2 hampir mendekati 0, maka tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6 Uji Asumsi Klasik

3.6.1 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas dapat diartikan bahwa terdapat hubungan linier yang sempurna atau hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dengan model regresi (Ghozali, 2013: 101). Tujuan dari uji multikolinieritas ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel tidak terikat (*independen*). Tidak terjadinya korelasi diantara variabel tidak terikat (*independen*) mencerminkan modal regresi yang baik (Ghozali, 2013: 105). Apabila nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan *VIF* ≥ 10 maka dapat diartikan terjadi multikolinieritas. Namun apabila nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan *VIF* ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

3.6.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama. Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi digunakan uji Glejser dengan langkah-langkah sebagai berikut : (gujarati, 2003)

- 1) Melakukan regresi variabel terikat Y terhadap variabel penjelas Xi dan memperoleh residual;
- 2) Melakukan regresi dari nilai absolut residual terhadap nilai Xi yang mempunyai hubungan erat;
- 3) Menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas dengan uji statistik, untuk menguji hipotesis.

Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Apabila probabilitas terhitung $> \alpha$ (0,05), maka dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas;
- 2) Apabila probabilitas terhitung $< \alpha$ (0,05), maka dalam model terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi yaitu alat uji ekonometrika yang digunakan untuk menguji suatu model apabila kesalahan pengganggu pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu pada periode lainnya. Untuk mengetahui apakah model regresi mengandung autokorelasi digunakan uji Durbin Watson (Gujarati, 2003):

$$P = 1 - \frac{1}{2} Dw$$

Rumusan Hipotesis :

H₀ : P = 0, artinya variabel bebas mengestimasi pengaruh pdrb, investasi dan inflasi dalam negeri terhadap PAD di Kabupaten Jember tidak terdapat autokorelasi

H_i : P ≠ 0, artinya variabel bebas mengestimasi pengaruh pdrb, investasi dan inflasi dalam negeri terhadap PAD di Kabupaten Jember terdapat autokorelasi.

Kriteria Pengujian :

- Jika $dW > 4 - dL$, maka H₀ ditolak, berarti ada autokorelasi positif maupun negatif ;
- Jika $dU < dW < 4 - dU$, maka H₀ diterima, berarti tidak ada autokorelasi
- Jika $dU < dW < dU$ atau $4 - dU < 4 - dL$, maka tidak ada kesimpulan.

3.6.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013:160). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam pengujian normalitas data penelitian. Uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah pengujian normalitas data dengan cara membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Pengambilan keputusan atas pengujian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat adanya perbedaan yang signifikan atau dapat dikatakan populasi terdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat adanya perbedaan yang signifikan atau dapat dikatakan populasi tidak terdistribusi normal.

3.7 Definisi Variabel Operasional

Variabel operasional merupakan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel operasional ini dimaksudkan untuk menjelaskan istilah yang digunakan penelitian dan menghindari meluasnya permasalahan. Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain:

- a. PDRB di Enam Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2016 yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah;
- b. Jumlah Penduduk di Enam Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2016 yang dinyatakan dalam juta jiwa;
- c. Inflasi menggunakan tingkat inflasi yang terjadi di Enam Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2016 yang dinyatakan dalam satuan persen;
- d. PAD menggunakan besaran penerimaan pendapatan daerah yang dikelola pemerintah masing-masing Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2016 yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PDRB berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0.0000. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio PDRB mengalami peningkatan maka akan meningkatkan PAD Enam Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2010-2016
2. Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan sebesar 0.0029. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio Jumlah Penduduk mengalami kenaikan maka akan menurunkan PAD Enam Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2010-2016.
3. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan sebesar 0.8248. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tingkat Inflasi mengalami kenaikan maka akan meningkatkan PAD Enam Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2010 - 2016.

5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. PDRB perlu ditingkatkan untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk meningkatkan PDRB.
2. Menanggulangi masalah PDRB merupakan hal yang perlu dilakukan. Perlunya kebijakan yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya ketimpangan di setiap daerahnya.
3. Lebih banyak membuka lapangan pekerjaan agar semua variabel bebas bisa meningkat pula, yang nantinya akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah melalui PDBR per Kapita.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, 2013. *Hubungan Retribusi Daerah dan Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel*. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Agoes, 2011. *Analisis Kontribusi Penerimaan Kontribusi Pasar terhadap PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan*. STIE Perbanas Surabaya.
- Antari, 2013. *Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Gianyar*. Universitas Udayana Bali.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Chindy, 2016. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013*. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Ghozali, 2011. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. BP Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2007. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. BP Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar, 2003, *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Indriantoro, Nur Dan Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta. BPFE
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Indriantoro, Nur Dan Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta. BPFE
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Indriantoro, Nur Dan Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta. BPFE
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Jakarta. Elex Media Komputindo

- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Anggota IKAPI Jatim.
- Lukitorini, Lea Sad Dwi Winda Sari Mien. 2015. *Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap PAD Studi Kasus di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2013*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Marsum. 2005. *Restoran dan Segala Permasalahannya*. Edisi IV. Yogyakarta.
- Maya, Erwinda Dwi. 2014. *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Batu*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Munir, B, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Badan Penerbit BAPPEDA, Nusa Tenggara Barat.
- Nathania, Yohana. 2016. *Analisis Pertumbuhan, Potensi, dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011 – 2014)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2010 *Tentang Pajak Restoran*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 5 Tahun 2010 *Tentang Pajak Hotel*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2010 *Tentang Pajak Hiburan*.
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan*.
- Priyatno, Duwi. 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendaran*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Rarung 2016. *Pengaruh PAD dan Dau Terhadap Pdrb Di Kota Manado*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Santosa 2005. *Analisis PAD dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*. Universitas Brawijaya Malang
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

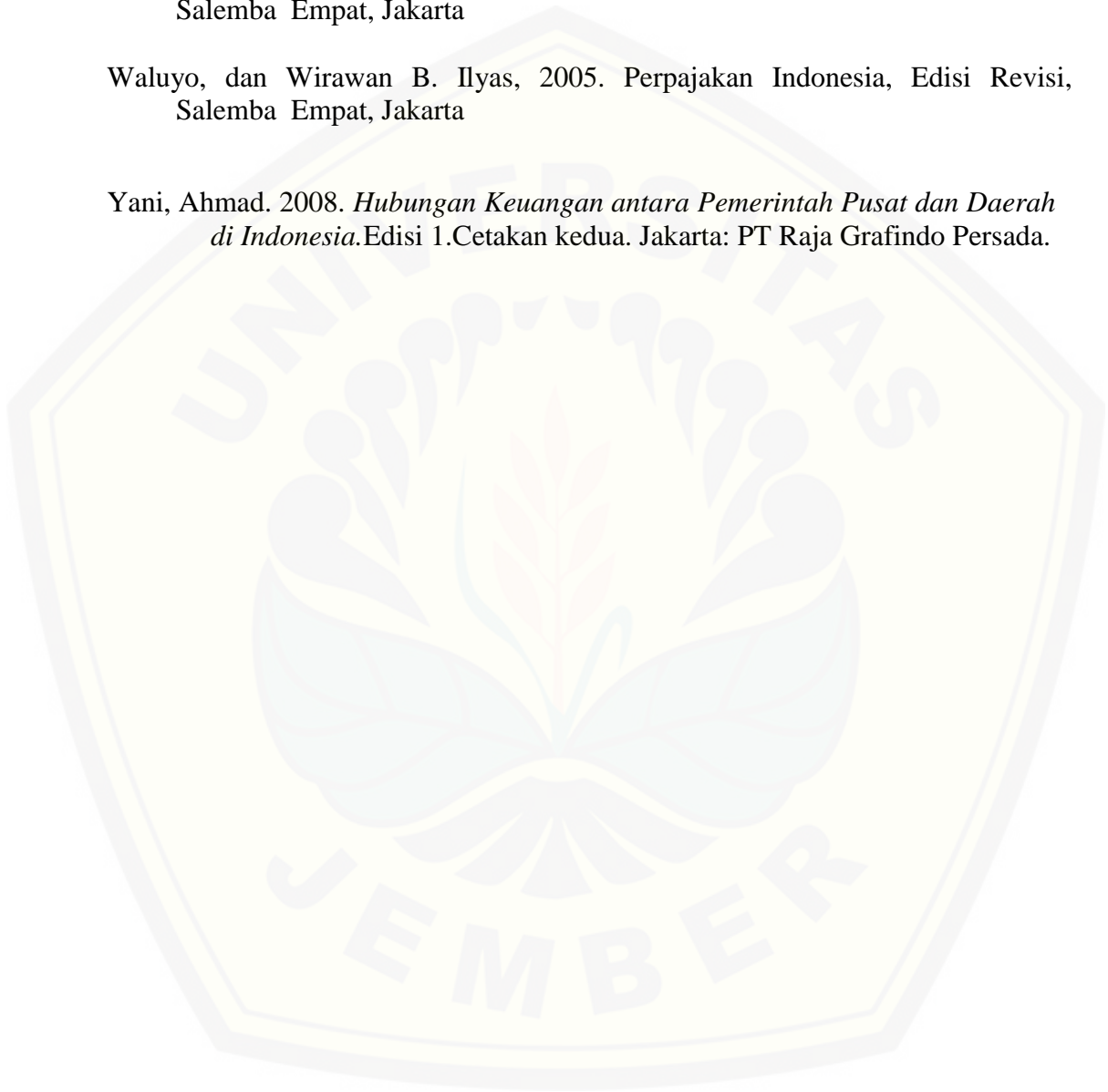
- Siahaan.2009. Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia.Yogyakarta : Graha Ilmu
- Siahaan.2010. Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia.Yogyakarta : Graha Ilmu
- Simanjuntak, Payaman.J .2003. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta : LPFE-UI
- Singarimbun, Masri. 2006. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sirojuzilam dan Mahalli, K. 2010.Regional.Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi.USU Press. Medan
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alvabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Sukirno, Sadono. 2002. Teori Mikro Ekonomi. Cetakan Keempat Belas. Rajawali Press: Jakarta
- Sulastiyono, Drs, M.si. 1999. Manajemen Penyelenggaraan Hotel. Alfabeta. Bandung
- Supadmi. 2009. “Meningkatkan Kepatuhanan Wajib Pajak Melalui Kualiiitas”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Vol. 4, No. 2
- Susanto, Singgih. 2010. *Statistik Multivariate. Konsep Dan Aplikasi Dengan Spss*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Utami, Engi Sandi. 2014. *Pengaruh Pajak Restoran dan Hotel terhadap PAD Kota Bandung (Tahun 2009-2013)*.Fakultas Ekonomi Universitas Telkom.

Wachdin, Faizah. 2010. *Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2003. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2005. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi 1. Cetakan kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



LAMPIRAN A. DATA PENELITIAN**Lampiran A.1** Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha pada Enam Kota/Kabupaten di Jawa Timur (Miliar Rupiah), 2010-2016

Tahun	Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur					
	Surabaya	Malang	Jember	Kediri	Madiun	Sumenep
2010	231 204.7	31 377.3	33 375.5	57 550.6	6 081.2	15 136.5
2011	247 686.6	33 273.7	35 208.2	60 020.1	6 494.4	16 064.8
2012	265 892.1	35 355.7	37 262.0	63 185.1	6 937.7	17 665.0
2013	286 050.7	37 547.7	39 519.2	65 408.8	7 470.7	20 218.1
2014	305 947.6	39 724.7	41 971.7	69 232.9	7 965.3	21 476.9
2015	324 215.2	41 952.1	44 222.6	72 945.5	8 455.4	21 750.6
2016	343 652.6	44 303.9	46 533.6	76 988.4	8 954.7	22 311.7

Sumber : Badan Pusat Statistika Jawa Timur, 2010-2016 diolah

Lampiran A.2 Jumlah Penduduk pada Enam Kota/Kabupaten di Jawa Timur (Juta Jiwa), 2012-2016

Tahun	Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur					
	Surabaya	Malang	Jember	Kediri	Madiun	Sumenep
2010	2 771 615	822 201	2 329 929	269 193	171 305	1 044 588
2011	2 788 932	828 491	2 353 025	271 511	172 073	1 050 678
2012	2 805 718	834 527	2 367 482	273 695	172 886	1 056 415
2013	2 821 929	840 803	2 381 400	276 619	174 114	1 061 211
2014	2 833 924	845 973	2 394 608	278 072	174 373	1 067 202
2015	2 848 583	851 298	2 407 115	280 004	174 995	1 072 113
2016	2 862 406	856 410	2 424 982	281 978	175 607	1 076 805

Sumber : Badan Pusat Statistika Jawa Timur, 2010-2016 diolah

Lampiran A.3 Inflasi pada Enam Kota/Kabupaten di Jawa Timur (Persen), 2012-2016

Tahun	Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur					
	Surabaya	Malang	Jember	Kediri	Madiun	Sumenep
2010	5.4	4.9	5.0	5.2	4.9	5.1
2011	6.2	5.1	4.9	4.6	5.0	4.9
2012	4.4	4.4	3.9	4.8	3.7	5.4
2013	6.6	7.4	6.7	7.1	6.5	6.6
2014	6.3	6.7	5.9	6.2	6.0	5.9
2015	6.0	6.0	5.0	4.5	5.1	5.2
2016	3.2	3.1	2.5	1.8	2.8	2.8

Sumber : Kajian Ekonomi Regional, 2012-2016

Lampiran A.4 Pendapatan Asli Daerah pada Enam Kota/Kabupaten di Jawa Timur (Juta Rupiah), 2012-2016

Tahun	Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur					
	Surabaya	Malang	Jember	Kediri	Madiun	Sumenep
2010	1 036 167.5	101 519.5	146 452.6	77 666.6	28 146.3	37 940.0
2011	2 139 625.6	158 446.8	180 265.8	88 275.2	38 037.5	47 385.2
2012	2 353 324.9	175 985.1	211 617.9	101 473.8	46 554.0	69 786.8
2013	2 570 793.9	262 741.1	290 135.2	126 965.3	55 683.8	91 136.8
2014	2 953 980.9	336 245.8	460 926.6	137 460.8	85 739.8	115 497.6
2015	3 520 137.3	353 427.7	508 051.0	128 676.4	111 379.4	166 654.3
2016	3 839 158.4	379 846.8	485 081.9	191 731.5	132 435.4	169 032.5

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Negara, 2010-2016 diolah

LAMPIRAN B. UJI DATA PANEL**Lampiran B.1 Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	41.763059	(5,33)	0.0000
Cross-section Chi-square	83.649998	5	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: PAD
Method: Panel Least Squares
Date: 11/04/18 Time: 16:53
Sample: 2010 2016
Periods included: 7
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-146117.1	181516.7	-0.804979	0.4258
GDP	9.186154	0.614897	14.93934	0.0000
POP	0.085225	0.059373	1.435421	0.1593
INF	-15154.63	33722.93	-0.449387	0.6557
R-squared	0.926290	Mean dependent var		583609.3
Adjusted R-squared	0.920471	S.D. dependent var		1000004.
S.E. of regression	282010.5	Akaike info criterion		28.02767
Sum squared resid	3.02E+12	Schwarz criterion		28.19316
Log likelihood	-584.5810	Hannan-Quinn criter.		28.08833
F-statistic	159.1778	Durbin-Watson stat		0.451462
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Lampiran A1, A2, A3 dan A4, diolah

Lampiran B.2 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.782230	3	0.4332

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
GDP	20.261821	16.697538	2.101839	0.0140
POP	1.811031	-0.367584	2.137369	0.1362
INF	12854.10458	7 -3046.174744	5657149.4881	60

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PAD

Method: Panel Least Squares

Date: 11/04/18 Time: 16:52

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3303606.	1757625.	-1.879586	0.0690
GDP	20.26182	1.703584	11.89364	0.0000
POP	1.811031	1.466517	1.234921	0.2256
INF	12854.10	13868.38	0.926864	0.3607

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.989941	Mean dependent var	583609.3
Adjusted R-squared	0.987502	S.D. dependent var	1000004.
S.E. of regression	111793.1	Akaike info criterion	26.27410
Sum squared resid	4.12E+11	Schwarz criterion	26.64646
Log likelihood	-542.7560	Hannan-Quinn criter.	26.41058
F-statistic	405.9535	Durbin-Watson stat	1.932013
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : lampiran A1, A2, A3 dan A4, diolah

Lampiran B.3 Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	5.067803 (0.0244)	0.007773 (0.9297)	5.075576 (0.0243)
Honda	2.251178 (0.0122)	0.088162 (0.4649)	1.654163 (0.0490)
King-Wu	2.251178 (0.0122)	0.088162 (0.4649)	1.722044 (0.0425)
Standardized Honda	3.934115 (0.0000)	0.531732 (0.2975)	-0.303352 --
Standardized King-Wu	3.934115 (0.0000)	0.531732 (0.2975)	-0.194694 --
Gourierioux, et al.*	--	--	5.075576 (< 0.05)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	

Sumber : Lampiran A1, A2, A3 dan A4, diolah

LAMPIRAN C. UJI STATISTIKA**Lampiran C. 1 Uji F (Uji Secara Serentak)**

Weighted Statistics			
R-squared	0.816912	Mean dependent var	104336.6
Adjusted R-squared	0.802458	S.D. dependent var	401412.8
S.E. of regression	178410.8	Sum squared resid	1.21E+12
F-statistic	56.51687	Durbin-Watson stat	0.788453
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : lampiran A1, A2, A3 dan A4, diolah

Lampiran C.2 Uji t (Uji Secara Parsial)

Dependent Variable: PAD
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/04/18 Time: 16:51
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 42
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-210011.5	169280.9	-1.240610	0.2224
GDP	16.69754	0.894628	18.66422	0.0000
POP	-0.367584	0.115333	-3.187156	0.0029
INF	-3046.175	13662.90	-0.222952	0.8248

Sumber : lampiran A1, A2, A3 dan A4, diolah

Lampiran C.3 Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.816912	Mean dependent var	104336.6
Adjusted R-squared	0.802458	S.D. dependent var	401412.8
S.E. of regression	178410.8	Sum squared resid	1.21E+12
F-statistic	56.51687	Durbin-Watson stat	0.788453
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : lampiran A1, A2, A3 dan A4, diolah

LAMPIRAN D. UJI ASUMSI KLASIK**Lampiran D.1 Uji Multikolinieritas**

	GDP	POP	INF
GDP	1.000000	0.683520	0.094645
POP	0.683520	1.000000	0.078227
INF	0.094645	0.078227	1.000000

Sumber : lampiran A1, A2, A3 dan A4, diolah

Lampiran D.2 Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/04/18 Time: 17:18
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 42
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	275884.8	136436.2	2.022079	0.0502
GDP	16.69754	0.894628	1.16622	0.1213
POP	-0.367584	0.115333	-1.18756	0.1129
INF	-2241.612	14377.40	-0.155912	0.8769

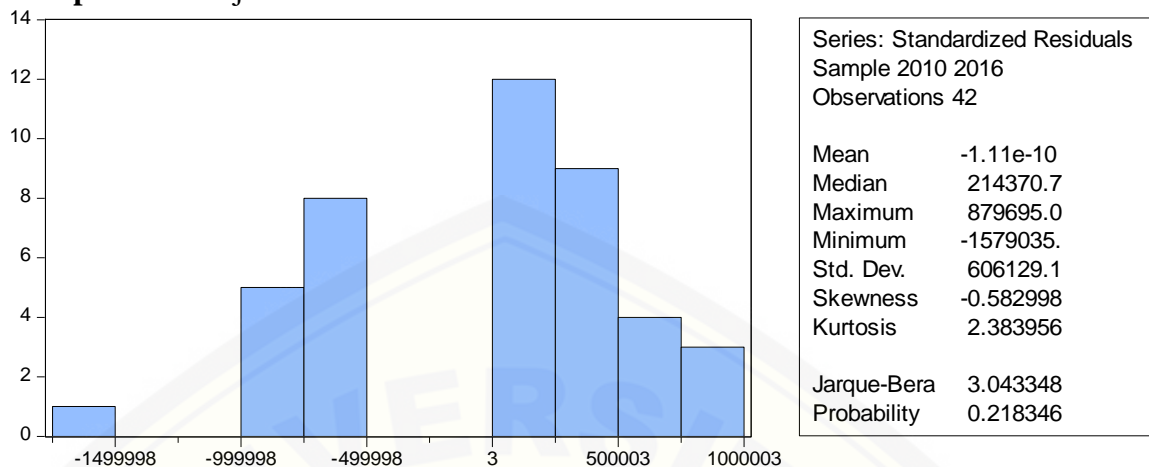
Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		171368.4	0.6781
Idiosyncratic random		118080.2	0.3219

Weighted Statistics			
R-squared	0.162568	Mean dependent var	130246.1
Adjusted R-squared	0.096455	S.D. dependent var	152112.1
S.E. of regression	144590.1	Sum squared resid	7.94E+11
F-statistic	2.458947	Durbin-Watson stat	1.147155
Prob(F-statistic)	0.077579		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.140757	Mean dependent var	516794.3
Sum squared resid	3.30E+12	Durbin-Watson stat	0.275785

Sumber : lampiran A1, A2, A3 dan A4, diolah

Lampiran D.3 Uji Normalitas



Sumber : lampiran A1, A2, A3 dan A4, diolah

Lampiran D.4 Uji Autokorelasi

Dependent Variable: PAD
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/04/18 Time: 16:51
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 42
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-210011.5	169280.9	-1.240610	0.2224
GDP	16.69754	0.894628	18.66422	0.0000
POP	-0.367584	0.115333	-3.187156	0.0029
INF	-3046.175	13662.90	-0.222952	0.8248

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		232540.1	0.8123
Idiosyncratic random		111793.1	0.1877

Weighted Statistics			
R-squared	0.816912	Mean dependent var	104336.6
Adjusted R-squared	0.802458	S.D. dependent var	401412.8
S.E. of regression	178410.8	Sum squared resid	1.21E+12
F-statistic	56.51687	Durbin-Watson stat	0.788453
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.632610	Mean dependent var	583609.3
Sum squared resid	1.51E+13	Durbin-Watson stat	0.063312

Sumber : lampiran A1, A2, A3 dan A4, diolah